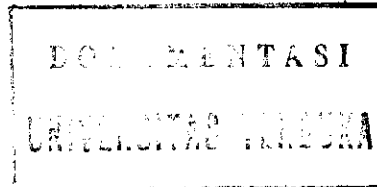


80443

80443.pdf

75/00443



SISTEM PEMBIAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA

**Studi kasus yang dilaksanakan oleh Proyek COL dan ICDE
dalam Studi Sistem Pembiayaan dan Pendanaan di Pendidikan Jarak Jauh**

Oleh:

**Ir. RATNA KESUMA M.A
Ir. NADIA SRI DAMAJANTI M.Ed
SOETRISNO M.A**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia
Juni, 1994**

ABSTRAKSI

Sistem pembiayaan suatu universitas umumnya berkaitan erat dengan sistem pendidikan yang diterapkan di institusi tersebut. Dalam rangka ingin mengetahui bagaimana kekhususan sistem pembiayaan yang ada di Universitas Terbuka (UT) sebagai suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menyelenggarakan sistem belajar jarak jauh, maka diadakan suatu studi tentang sistem pembiayaan di UT. Sistem pembiayaan tiga PTN lain (IKIP Bandung, IPB, UGM) yang melaksanakan sistem belajar tatap muka, juga ditelaah dalam studi ini sebagai bahan perbandingan. Studi ini terlaksana atas bantuan dana dari Commonwealth of Learning (COL) di Vancouver, British Columbia, Canada.

Model pembiayaan yang dikembangkan oleh Hardy (1988) dimodifikasi sesuai dengan kekhususan sistem pembiayaan PTN di Indonesia, untuk diaplikasikan dalam studi ini. Issue pembiayaan yang ditelaah dalam studi ini mencakup sumber dana, alokasi dana, daya serap dana, pengaruh pendanaan terhadap output universitas sebagai sebuah Perguruan Tinggi (PT). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif (persentase dan distribusi frekuensi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum prosedur perolehan dan pengalokasian dana di UT ataupun di ketiga PTN pembanding tidak berbeda jauh. Dana bersumber dari Pemerintah dan usaha PTN sendiri yang disebut sebagai dana masyarakat. Pengalokasian dana dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: berdasarkan jenis kegiatan PT, berdasarkan unit kegiatan di dalam PT, dan berdasarkan jenis pengeluaran.

Dalam hal perolehan dana, UT sebagai PT yang menerapkan sistem belajar jarak jauh tidak memperoleh anggaran untuk pembangunan sarana fisik perkuliahan tetapi dikompensasikan dengan besarnya jumlah mahasiswa. Hal ini berbeda dengan PTN seperti IPB yang memperoleh dana tahunan tertinggi diantara PT sampel karena intensifnya kegiatan praktikum di laboratorium dan di lapangan. Ditinjau dari pengalokasian dana, ada kecenderungan yang sama bahwa kegiatan pendidikan dan kerumahtanggaan mendapat perhatian khusus di UT, IKIP Bandung, dan IPB. Sedangkan di UGM kesejahteraan pegawai mendapat porsi yang terbesar. Daya serap dana di empat PTN sampel ini cukup tinggi.

UT memiliki jumlah mahasiswa yang terbesar, namun UGM mempunyai jumlah lulusan yang terbanyak dibandingkan ketiga PTN lainnya. UGM, universitas tertua di Indonesia, paling banyak menawarkan program studi, mempunyai jumlah tenaga akademik dan administratif dan koleksi perpustakaan yang terbanyak diantara PTN sampel. Output yang dicapai seperti penelitian tampaknya kurang dipengaruhi oleh besarnya dana yang tersedia tetapi cenderung dipengaruhi oleh kuantitas dan kualifikasi tenaga pengajarnya. Dalam hal ini UGM terlihat paling produktif dibandingkan dengan IKIP Bandung, IPB, dan UT.

Studi ini memberikan gagasan bahwa seyogyanya secara teknis cara perolehan dan pembiayaan PTN yang bersifat jarak jauh dibedakan dengan PTN tatap muka. Faktor-faktor seperti banyaknya jumlah mahasiswa dan tersebar nya mahasiswa UT di seluruh pelosok tanah air menuntut pola pengelolaan pendidikan yang berbeda dengan PTN yang mahasiswanya melakukan kegiatan belajar di dalam kampus, seperti di IKIP Bandung, IPB, dan UGM. Berbedanya pola pengelolaan kegiatan pendidikan berimplikasi terhadap sistem pendanaan yang dibutuhkan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN	
I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Tujuan	2
Manfaat Penelitian	2
Metodologi	2
II SISTEM PEMBIAYAAN DI UT	3
Sumber Dana	3
Cara Perolehan Dana	5
Pengalokasian Dana	9
Penggunaan Dana	10
Daya Serap Dana	13
Hasil yang Dicapai UT	14
Masalah, Hambatan, dan Saran tentang Sistem Pembiayaan di UT	16
III SISTEM PEMBIAYAAN DI PERGURUAN TINGGI	18
Perguruan Tinggi Pembanding	18
Sumber Dana	19
Cara Perolehan dan Penganggaran Dana	19
Dana Tambahan	20
Alokasi Dana	20
Penggunaan Dana	20
Daya Serap	21
Hasil yang Dicapai	22
Masalah, Hambatan dan Saran tentang Sistem Pembiayaan	23
IV PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UT DENGAN PTN LAINNYA	25
V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	27
Kesimpulan	27
Implikasi	28
KEPUSTAKAAN	29
LAMPIRAN A	31
LAMPIRAN B	32
LAMPIRAN C	33
LAMPIRAN D	34
LAMPIRAN E	35

BAGIAN 1. PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah

Universitas Terbuka (UT) merupakan satu-satunya Pendidikan Tinggi Negeri di Indonesia yang menyelenggarakan program belajar mengajar dengan sistem jarak jauh. Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 150.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, menyebabkan UT dirancang agar dapat menawarkan matakuliah-matakuliahnya pada mahasiswa yang sangat beragam kualifikasinya dengan pola belajar mandiri. Secara umum, hampir tidak ada kegiatan perkuliahan di kelas ataupun praktikum di laboratorium, sebaliknya mahasiswa UT belajar melalui modul, kaset audio, serta program televisi dan radio.

Perbedaan dalam penyampaian materi pengajaran ini tentunya membawa implikasi dalam pengelolaan pembiayaannya. Sampai sejauh ini belum ada penelitian yang khusus mempelajari sistem pembiayaan di perguruan tinggi non tatap muka. Studi ini dilaksanakan untuk mengetahui kekhususan sistem pembiayaan di UT sebagai institusi pendidikan jarak jauh. Studi ini dilaksanakan atas kerjasama UT dengan Commonwealth of Learning (COL) Canada untuk mengetahui tentang formula, sumber dana, cara perolehan dan pengalokasian dana. Pembahasan tentang pembiayaan di UT dilengkapi pula dengan diadakannya studi perbandingan dengan sistem pembiayaan Perguruan Tinggi (PT) lain yang menggunakan sistem tatap muka. Tiga buah PTN yang dipilih sebagai universitas pembanding adalah Universitas Gadjah Mada sebagai PT terbesar dalam skala universitas, Institut Pertanian Bogor sebagai PT yang menyelenggarakan program eksak bidang pertanian dalam pola insititut, dan Insititut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang juga berpola institut. Adapun pihak lain yang menjadi sumber informasi dalam studi ini adalah Bagian Pengolahan Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud.

Tujuan

Secara lebih jauh, studi ini bertujuan untuk mengetahui macam sumber dana, prosedur perolehan dana, metode pengalokasian dana, realisasi dana, efek dari pendanaan terhadap kegiatan operasional dan output pendidikan baik di UT maupun di PTN lainnya. Dengan kata lain studi ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang:

1. Bagaimana UT dan PTN pembanding memperoleh dana
2. Bagaimana UT dan PTN pembanding mengalokasikan dana
3. Bagaimana daya serap dana di UT dan PTN pembanding
4. Hasil apa saja yang telah dicapai oleh UT dan PTN pembanding.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk melatih peneliti muda dalam melakukan penelitian tentang pembiayaan perguruan tinggi. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penentu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembiayaan di UT.

Metodologi

Studi ini menggunakan modifikasi dari studi model/pola pembiayaan yang dikembangkan oleh Hardy (1988). Model ini menggunakan 3 aspek yaitu: dana, penggunaan dana, dan efektifitas dana. Aspek dana meliputi sumber dana dan besarnya dana, aspek penggunaan dana adalah pemanfaatan dana untuk kepentingan administrasi, peningkatan institusi, dan penunjang, sedangkan aspek efektifitas dana mencakup peningkatan dalam jumlah mahasiswa dan lulusan.

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui wawancara dengan para pejabat yang berwenang dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Data tentang penerimaan dan pengeluaran perguruan tinggi sampel diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada di UT, IKIP Bandung, IPB, UGM, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud.

BAGIAN II. SISTEM PEMBIAYAAN DI UT

Sumber dana

Sumber dana bagi pembiayaan UT dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber dana yang berasal dari Pemerintah dan sumber dana yang berasal dari usaha UT sendiri. Sumber dana yang pertama adalah dana yang berasal dari Pemerintah. Dana ini disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdikbud merupakan dana yang disediakan Pemerintah untuk penyelenggaraan dan perbaikan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan tinggi di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk UT. Dana ini merupakan bagian dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) Depdikbud yang ditetapkan Pemerintah setiap tahunnya. Dana pemerintah disalurkan melalui dua jenis anggaran yang disebut sebagai anggaran Rutin (DIK) dan anggaran Pembangunan (DIP), serta anggaran Operasi dan Perawatan Fasilitas (DIP OPF).

Sumber dana yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat. Dana ini diperoleh antara lain dari pembayaran SPP mahasiswa, penjualan produk UT, hasil kontrak kerja, serta sumbangan dan hibah. Dana ini merupakan imbalan jasa yang diterima UT dalam rangka menjalankan fungsi dengan memberikan pelayanan dan pelaksanaan pendidikan tinggi kepada masyarakat, sehingga dana ini disebut juga sebagai Dana Perolehan dari Masyarakat. Karena penerimannya cukup potensial, diperkirakan pada suatu saat nanti UT dapat mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya.

Selain kedua jenis sumber dana tersebut diatas, UT menerima juga dana yang berasal dari luar negeri. Bantuan ini biasanya diberikan secara langsung berupa sumbangan hibah (grant) oleh lembaga atau perguruan tinggi yang ada di luar negeri kepada Universitas Terbuka. Bantuan ini antara lain berbentuk pemberian bea siswa untuk pendidikan staf edukatif/administrasi, bantuan konsultan, alat praktikum, dan kerjasama penelitian. Sedangkan bantuan luar negeri yang berupa loan atau softloan disalurkan melalui anggaran pembangunan (DIP murni atau DIP OPF).

Tabel 2.1 Sumber Dana UT
(dalam Rp 000,00)

No.	Macam Dana	1991/1992		Tahun Anggaran 1992/1993		1993/1994	
			%		%		%
1.	Rutin	2 400 498	26	2 789 301	17	3 010 588	17
2.	Pembangunan	2 400 801	25	1 598 585	17	1 900 000	10
3.	OPF	456 608	5	1 201 309	7	1 218 529	7
4.	Dana Masyarakat						
a.	SPP	1 653 494	18	6 287 952	38	6 116 274	36
b.	Non SPP	2 395 453	26	419 290	21	5 750 000	32
J u m l a h		9 306 854	100	10 626 721	100	17 995 385	100

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 bahwa pada dasarnya jumlah penerimaan UT setiap tahun cenderung naik, namun bila dilihat dari angka persentase perbandingan penerimaan, dapat dilihat bahwa penerimaan UT dari dana masyarakat terus meningkat sedangkan penerimaan dari pemerintah cenderung menurun. Pada awal pengembangan UT sebagai lembaga baru, dana pemerintah lebih banyak digunakan untuk biaya investasi dalam rangka pembangunan fisik yang berupa prasarana dan sarana, disamping juga untuk penambahan biaya operasional, karena jumlah mahasiswa belum besar, karena itu penerimaan UT dari dana pemerintah cenderung besar jumlahnya. Pembangunan fisik dilaksanakan secara berangsur namun karena UT sebagai PTN baru maka dana dari pemerintah tetap diperlukan untuk biaya investasi pembangunan fisik yang belum selesai dan pemeliharaan, maka biarpun menunjukkan penurunan angka persentase, tetapi dari segi jumlah konstan atau cenderung naik. Lain halnya dengan dana yang diperoleh UT dari SPP dan penjualan produk-produk UT yang terlihat terus meningkat baik dari segi jumlah nominal penerimaan maupun dari perbandingan persentase dengan dana pemerintah, karena adanya kenaikan jumlah mahasiswa. Kenaikan jumlah mahasiswa juga membawa dampak terhadap naiknya penjualan produk-produk UT yang diantaranya adalah modul.

Cara Perolehan dan Penganggaran Dana

Proses perolehan dan penganggaran dana tergantung pada jenis sumber dana yang ada di UT. Dana yang berasal, baik dari pemerintah, dari usaha UT sendiri, maupun dari bantuan langsung dalam/luar negeri, memiliki prosedur perolehan dan penganggaran yang berbeda-beda.

Dana Pemerintah. Proses perolehan dan penganggaran dana pemerintah didasarkan pada prosedur yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti Depdikbud. Prosedur ini diatur melalui suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) yang dibuat pada tahun 1984 dan diperbaharui kembali pada tahun 1993, sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem keuangan negara. Prosedur perolehan dana ini berlaku sama untuk seluruh PTN, Kopertis dan seluruh unit-unit di lingkungan Ditjen Dikti. Setiap tahun pada bulan Juni, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijaksanaan pemerintah tentang APBN di lingkungan Ditjen Dikti yang tertuang dalam Memo Program Koordinatif (MPK). Berdasarkan MPK dari Dirjen Dikti ini, maka UT menyusun rencana usulan anggaran yang bersumber dari APBN dengan jalan mengidentifikasi dan menginventarisasi setiap kebutuhan dari setiap unit kerja di UT (fakultas, lembaga, pusat-pusat, biro-biro dan unit lain di pusat dan UPBJJ sebagai unit operasional di daerah) yang berupa usulan anggaran pembiayaan untuk satu tahun anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun dana masyarakat. Usulan ini harus sesuai dengan rencana jangka panjang yang berupa Rencana Induk Pengembangan UT (RIP UT), rencana jangka menengah UT, termasuk pelaksanaan program kerja tahun lalu yang belum terselesaikan. Setelah usulan ini dievaluasi oleh Senat UT, hasilnya kemudian disahkan oleh Rektor, dan ditetapkan sebagai usulan anggaran yang akan diajukan ke Dikti.

Anggaran yang diajukan oleh UT terdiri dari anggaran Rutin, anggaran Pembangunan, dan anggaran OPF. Usulan anggaran ini dievaluasi oleh Dikti, dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum Keuangan (MK) yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Berdasarkan MK, UT menyusun kembali Usulan Lembaran Kerja yang berisikan rencana kegiatan, sasaran, dan anggaran pembiayaannya. Usulan ini dibahas secara bersama-sama oleh Depdikbud (Setjen, Ditjen, dan unit kerja terkait), Ditjen Anggaran, dan Bappenas. Hasil pembahasan

merupakan anggaran tahunan yang telah disetujui dan dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK), Daftar Isian Proyek (DIP), yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dirjen Dikti menyiapkan dan mengesahkan Petunjuk Operasional (PO)-nya, berikut disusul dengan penetapan Pemimpin dan Bendahara Proyek oleh Mendikbud. Setelah seluruh perangkat APBN, yang berupa DIK, DIP, PO, SK Pimpro dan Benpro diterima oleh UT, maka rektor bersama pejabat struktural dan fungsional terkait melaksanakan DIK dan rektor sebagai atasan langsung bersama Pimpro dan Benpro melaksanakan DIP, sesuai dengan PO-nya.

Besarnya anggaran direncanakan dan diprediksikan untuk setiap jangka waktu 5 tahun, jadi disesuaikan dengan masa Repelita. Dengan demikian besarnya anggaran pendidikan UT setiap tahun harus mengacu pada rencana anggaran 5 tahun tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ada dalam SP4, pengusulan besarnya anggaran dihitung berdasarkan pada jumlah mahasiswa, kurikulum program studi, jumlah lulusan, serta jumlah tenaga akademik dan administrasi yang ada.

Besarnya dana untuk kegiatan operasional pendidikan ditentukan oleh perkalian jumlah mahasiswa, jumlah tenaga akademik dan administrasi dengan biaya per unit yang telah ditetapkan oleh Dikti. Sedangkan besarnya anggaran untuk pembangunan fisik kampus ditentukan oleh perkalian antara jumlah mahasiswa/tenaga akademik/tenaga administrasi dengan jumlah M^2 bangunan yang dibutuhkan dan biaya per unit bangunan yang ditetapkan oleh Ditjen Ciptakarya Departemen Pekerjaan Umum. Faktor jumlah lulusan dan ratio antara mahasiswa dengan dosen dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang output yang telah dicapai oleh UT pada tahun sebelumnya.

Mengingat besarnya jumlah mahasiswa UT yang sudah mencapai angka ratusan ribu dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, dan kekhususan sistem belajar jarak jauh yang diselenggarakan dimana mahasiswa tidak membutuhkan ruang kuliah dalam proses belajar mengajarnya, maka penentuan besarnya anggaran berdasarkan perhitungan yang tertuang pada SP4 tersebut agak sulit diterapkan. Karena itu besarnya anggaran yang diajukan oleh UT didasarkan pada jumlah mahasiswa yang mendaftar, jumlah tenaga akademik dan administrasi, serta implikasinya pada kegiatan program pendidikan yang harus dijalankan, di seluruh daerah di Indonesia, dengan pengendalian mutu

akademik, terpusat pada UT Pusat, melalui pengembangan bahan belajar dan penyiapan naskah dan evaluasi ujian.

Review yang dilakukan oleh Ditjen Dikti terhadap besarnya anggaran yang diajukan UT didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain meliputi: penyelesaian proyek pembangunan fisik lanjutan; besarnya pinjaman luar negeri yang diperoleh Indonesia (digunakan sebagai counterpart fund); jumlah kerjasama luar negeri yang terjalin di UT; pembiayaan reguler untuk pendidikan, sarana dan prasarana serta pemeliharaan; pengembangan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan yang sedang dilaksanakan oleh UT. Disamping itu Ditjen Dikti juga mempertimbangkan penyebaran anggaran secara keseluruhan bagi PTN-PTN dan Kopertis yang ada di Indonesia. Umumnya realisasi anggaran yang diberikan oleh Ditjen Dikti adalah sekitar 50% dari anggaran yang diusulkan oleh UT. Hal ini terjadi karena UT merupakan PTN baru yang memerlukan investasi dana yang cukup besar, sehingga selalu mengusulkan jumlah anggaran yang cukup besar juga.

Diluar anggaran tahunan yang diterima, UT sering pula mengajukan usul untuk memperoleh dana tambahan. Dana tambahan yang diberikan bersumber dari dana pembangunan berbentuk: Anggaran Biaya Tambahan atau Realokasi, atau Suplemen. Sejak tahun 1990 sudah tidak ada lagi yang dinamakan dana ABT, yang ada adalah realokasi yang merupakan sisa dana APBN yang tidak terbagikan sehingga bisa digunakan sebagai dana tambahan pada anggaran pembangunan. Realokasi adalah dana tahun lalu yang tidak habis dalam pengalokasian pada proyek-proyek dari hasil pembahasan, sehingga harus dijadikan saving pada sektor tertentu, untuk bisa direalokasikan pada unit yang benar-benar memerlukan penyelesaian suatu kegiatan yang sangat urgen, atau kenaikan dana dan proyek-proyek yang berdasarkan evaluasi tengah tahunan dianggap tidak mampu menyerap dana tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran.

Dana suplemen adalah dana bantuan yang diperoleh dari bantuan luar negeri yang digunakan sebagai dana OPF dalam rupiah, dimana tambahan bantuan tersebut diperoleh pada waktu proyek sedang berjalan, sehingga ditambahkan pada proyek OPF sebagai suplemen proyek lama. Pengusulan dana tambahan biasanya dilakukan pada bulan Juli dan direalisasikan pada bulan

September, sehingga masih mempunyai waktu yang cukup untuk penyelesaian kegiatan tambahan tersebut sampai dengan akhir Maret tahun berikutnya.

Dana Perolehan dari Masyarakat. Dana ini merupakan imbalan jasa yang diperoleh UT dari pihak yang membutuhkan, yaitu mahasiswa dan masyarakat, dengan misi tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Penentuan besarnya SPP mahasiswa, harga penjualan modul dan hasil kontrak kerja, sumbangan dan hibah ditentukan oleh UT sendiri berdasarkan kalkulasi biaya kegiatan yang dibutuhkan.

Besarnya dana perolehan dari masyarakat pada UT dari segi jumlah nominal cenderung meningkat sepanjang tahun. Persentasi perbandingan antara dana masyarakat dengan APBN juga cenderung meningkat sepanjang tahun. Peningkatan dana dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini, dimana dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1993 terjadi peningkatan yang besarnya sekitar 41-75% dari seluruh anggaran yang diterima UT per tahun.

Tabel 2.2 Penerimaan Dana APBN dan Dana Masyarakat

Tahun	APBN		Dana Masyarakat	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1984/1985	6.130.920.000	59	4.328.998.000	41
1985/1986	8.718.476.000	55	7.218.160.000	45
1986/1987	3.183.885.000	34	8.160.001.000	68
1987/1988	1.329.732.000	23	4.256.406.000	77
1988/1989	6.564.749.000	60	4.212.240.000	40
1989/1990	2.420.426.000	42	3.317.666.000	58
1990/1991	4.865.954.000	57	3.563.086.000	43
1991/1992	3.892.120.000	32	8.444.500.000	68
1992/1993	5.589.195.000	35	9.956.404.462	65
1993/1994	6.129.111.000	25	10.776.631.000	75

Kebijakan penggunaan dana ini dilaksanakan oleh UT sendiri, secara otonomi, dengan pengesahan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, dimana penggunaan dananya melalui pola Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Jadi berdasarkan jumlah mahasiswa dan rencana kerjasama yang akan terjalin, UT memprediksikan jumlah penerimaannya dan mengajukan rencana kegiatan program pendidikan yang akan dilakukan dan penganggarnya yang disebut Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Rencana kegiatan yang ada dalam usulan ini

juga harus disetujui oleh Senat. Daftar usulan rencana kegiatan dan pembiayaan itu diusulkan untuk disahkan oleh Menteri Keuangan, menjadi Daftar Realisasi Kegiatan (DRK), untuk patokan atau petunjuk dalam realisasi kegiatan dan pembiayaannya secara otonomi oleh UT. Menganggrang dana dari masyarakat ini dilaporkan, disahkan dan dipertanggungjawabkan sebagai uang negara, namun bila dilihat dari waktu pengusulan dan sumber dananya belum pasti, maka tidak termasuk APBN yang disahkan dengan undang-undang.

UT juga menerima dana lain dari mahasiswa di luar pembayaran SPP yaitu biaya praktikum, pembelian bahan belajar dan biaya tutorial (jika ada). Biaya praktikum yang ditarik dari mahasiswa besarnya maksimal 100% dari dana SPP. Biaya ini ditarik dari mahasiswa yang mengambil matakuliah yang mewajibkan melakukan kegiatan praktikum. Karena sesuai dengan ciri khas UT yang melaksanakan pendidikan jarak jauh dengan mahasiswa tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka praktikum mahasiswa kebanyakan menggunakan KIT yang dapat dibeli langsung oleh mahasiswa untuk praktek mandiri dengan bimbingan instruktur/tutor. Sampai saat ini di empat fakultas yang ada di UT, hanya FKIP yang memerlukan praktikum terutama bagi program penyetaraan DII PGSD, yang biayanya sudah menjadi satu paket dengan biaya belajar. Sedangkan bagi program studi yang lain pembiayaan melalui giro pos ke UT pusat, sebagaimana membayar SPP. Dana masyarakat lainnya yang diterima oleh UT adalah hasil penjualan bahan belajar, hasil kerjasama dan hibah. Semua dana ini masuk dalam DURK, kecuali dana pembiayaan proyek Program DII PGSD dan DIII PGSITP yang dikelola langsung oleh Proyek bersangkutan, walaupun untuk pembiayaan kegiatan UT.

Pengalokasian Dana

Besarnya alokasi dana untuk setiap unit kerja di UT, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan besarnya anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan bobot dan volume kegiatan unit, yang disahkan oleh senat, pembiayaan unit bersumber dana-dana APBN dan dana masyarakat.

Secara intern, institusi mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan tingkat kepentingannya, baik itu bersumber dari dana unit, dana pembangunan. Pengalokasian dana bagi UPBJJ didasarkan pada jumlah tenaga

akademik, jumlah tenaga administrasi, dan jumlah mahasiswa yang ada. Sedangkan untuk unit di lingkungan pusat sesuai dengan volume kegiatan masing-masing secara proporsional berdasarkan jumlah dana yang tersedia demi menunjang kelancaran penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi.

Prosedur pengalokasian dana untuk setiap unit kerja didasarkan pada pola gabungan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Untuk unit kerja yang ada di UT Pusat, seluruh dana dikelola oleh Biro Administrasi Umum, jadi sistem pengelolaannya tersentralisasi. Sistem pengelolaan dana yang desentralisasi diterapkan untuk UPBJJ di seluruh daerah, dimana dana yang dialokasikan dikelola sendiri oleh masing-masing UPBJJ. Sampai saat ini UPBJJ belum memiliki sumber dana APBN maupun dana masyarakat secara mandiri, tetapi seluruh biaya masih diberikan droping oleh UT Pusat.

Alokasi dana diklasifikasikan menjadi 2 kelompok dana untuk Kantor Pusat dan dana untuk USB/UPBJJ di daerah, sedangkan sumber dana semua diterima oleh UT Pusat, baru dialokasikan ke daerah dan unit. Besarnya dana yang dialokasikan pada unit-unit di Pusat menunjukkan bahwa sebagian besar dana memang dikelola secara sentral di UT Pusat. Kegiatan yang dikelola oleh UT Pusat antara lain adalah kegiatan pengembang program studi, penyusunan struktur program, perumusan kurikulum, penulisan GBPP, penulisan bahan belajar, pengembangan media elektronika audio, video, fotografi, dan komputer, penyiapan berkas registrasi, pendistribusian berkas registrasi, pengolahan data mahasiswa, reproduksi modul, kaset audio dan video, kit praktikum, pendistribusian bahan belajar, pengembangan soal, perakitan naskah ujian. Kegiatan yang dilakukan di UPBJJ adalah penggandaan dan pendistribusian naskah ujian, penilaian hasil ujian, pengiriman hasil ujian, pelaksanaan wisuda. Kemudian penyiapan dukungan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, penelitian dan pengabdian masyarakat, bimbingan pembinaan mahasiswa.

Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh, baik dari Rutin, Pembangunan, OPF, Dana Perolehan dari Masyarakat, dan bantuan langsung dari dalam/luar negeri, pada prinsipnya digunakan untuk menyelenggarakan dan memperbaiki, membina, dan mengembangkan kegiatan pendidikan dalam 1 tahun anggaran. Pada tahun 1992/1993, waktu tahun anggaran bagi dana masyarakat disamakan dengan dana

APBN, hanya satu bulan lebih maju dimulai pada tanggal 1 Maret tahun sekarang sampai dengan tanggal 28 Februari tahun berikutnya, sehingga waktu pengelolaan seluruh anggaran tersebut menjadi mulai awal Maret dan sampai akhir Maret tahun berikutnya. Setiap jenis dana membiayai pos-pos pengeluaran yang merupakan jabaran dari penyelenggaraan dan perbaikan, pembinaan, dan peningkatan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan kerumahtanggaan.

Dana Rutin, sebagian besar diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan rutin dalam program pendidikan yaitu pembayaran belanja pegawai ($\pm 85\%$), belanja barang, pemeliharaan, dan perjalanan. Jadi, dana belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji pegawai yang melaksanakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan kerumahtanggaan. Demikian pula halnya dengan penggunaan dana belanja barang, pemeliharaan, dan perjalanan. Jika dana rutin tersisa untuk setiap tahun anggarannya, maka dana ini akan kembali ke kas negara dan menjadi milik negara.

Dana Pembangunan, disebut juga sebagai dana Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T), terdiri dari dana Bantuan Luar Negeri (BLN) dan dana rupiah murni. Dana BLN digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan dan manajemen. Jika dana BLN tidak dapat digunakan pada tahun anggaran sekarang, maka dana tersebut dapat dipindahkan (carry-over) ke tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan yang sama. Sedangkan dana rupiah murni, diperuntukkan bagi pengelolaan proyek, pengadaan tanah, pembangunan prasarana lingkungan kampus, pembangunan gedung pendidikan, pengadaan peralatan dan buku, pendidikan dan penataran, dan upaya peningkatan sistem UT. Sisa dana rupiah murni yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dikembalikan ke kas negara pada akhir tahun anggaran.

Dana OPF, digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan kerumahtanggaan, serta perawatan sarana dan prasarana. Sebagaimana halnya dengan dana bantuan luar negeri sisa dana OPF ini memiliki jangka waktu sangat variatif dan fleksibel, sehingga bisa dimanfaatkan seluruhnya tidak perlu dikembalikan, karena bisa carry-over juga.

Dana Masyarakat, diperuntukkan bagi biaya operasional (termasuk honor pegawai), pemeliharaan, perjalanan, dan peningkatan sumber daya manusia. Sisa dana ini dapat dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya sebagai saldo.

Sedangkan dana bantuan hibah (grant) dari dalam/luar negeri digunakan langsung dengan pengelolaan sendiri oleh pemberi hibah, yang biasanya bersifat innatura untuk biaya operasional pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Berikut adalah tabel-tabel yang memperlihatkan pengalokasian dan penggunaan dana berdasarkan 3 kriteria yaitu kriteria kegiatan yang ada di UT, pembelanjaan, dan pemakai.

Tabel 2.3 Alokasi Dana Berdasarkan Kegiatan di UT

#.	Kegiatan	1991/1992	%	Tahun anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Pengajaran	2 091 644	22,5	4 498 454	27,1	3 777 273	21,00
2.	Penelitian	24 649	,3	63 481	,4	78 368	,43
3.	Pengabdian (P2M)	28 339	,3	172 820	1,0	3 600	,02
4.	Kemahasiswaan	19 498	,2	49 108	,3	182 037	1,01
5.	Operasional	7 142 724	76,6	11 842 858	71,2	13 954 107	77,54
T o t a l		9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Tabel 2.3 memperlihatkan alokasi dana yang terbesar, lebih dari 70%, adalah untuk kegiatan operasional, termasuk biaya pembangunan gedung dan fasilitas fisik lainnya, peralatan, kendaraan, pemeliharaan, gaji dan honor. Biaya untuk kegiatan kegiatan dan distribusi modul juga merupakan bagian dari kategori ini. Alokasi dana terbesar kedua (21% sampai 27%) adalah kegiatan pengajaran. Kurang dari 2% dana dialokasikan untuk kegiatan penelitian, pengabdian, dan kemahasiswaan.

Tabel 2.4 Alokasi Dana Berdasarkan Pengeluaran Operasional di UT

#.	Pengeluaran	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Gaji	3 606 241	38,7	5 613 793	33,8	4 970 083	27,6
2.	Material	1 319 455	14,2	3 983 302	24,0	4 589 274	25,5
3.	Pemeliharaan	392 083	4,2	1 656 063	10,0	991 337	5,5
4.	Perjalanan	198 123	2,1	255 100	1,5	260 883	1,4
5.	Lain-lain	3 790 952	40,8	5 118 463	30,7	7 183 808	40,0
T o t a l		9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Pada tabel 2.4 terlihat bahwa pengeluaran tertinggi adalah untuk pembayaran gaji karyawan dan honor untuk penulis modul, pengembang soal ujian, tutor, konsultan, dan pengawas ujian. Alokasi dana terbesar kedua adalah untuk pembelian peralatan, alat tulis kantor, komputer dan perlengkapannya, serta perjalanan. Biaya pemeliharaan dan perjalanan hanya sekitar 7% sampai 10% dari dana keseluruhan. Kategori lain-lain meliputi pengeluaran untuk biaya administrasi dan pembelian tanah.

2.5 Alokasi Dana Berdasarkan Pemakai di UT

#. Pemakai	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
			1992/1993	%		
1. Fakultas	-	-	961 167	5,8	1 831 894	10,2
2. Pusat Penelitian	-	-	299 595	1,8	330 574	1,8
3. P2M	-	-	127 500	,8	173 962	1,0
4. Perpustakaan	-	-	106 170	,6	394 601	2,0
5. Pusat Komputer	-	-	34 450	,2	683 570	3,8
6. Pusat Registrasi	-	-	4 509 265	27,1	1 152 669	6,4
7. Pusat Produksi Media	-	-	4 767 905	28,7	204 725	1,1
8. Kantor Pusat	8 248 435	88,6	4 620 669	27,8	9 076 812	50,4
9. UPBJJ	1 060 419	11,4	1 200 000	7,2	4 147 018	23,0
T o t a l	9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Tabel menunjukkan bahwa sebagian besar dana dikelola di UT Pusat, sisanya dikelola oleh UPBJJ. Hal ini menunjukkan bahwa sentralisasi sistem pengelolaan dan pengoperasian digunakan dalam pengelolaan dana di UT.

Daya Serap Dana

Daya serap dana unit-unit kerja baik di UT Pusat maupun di UPBJJ relatif tinggi, yaitu berkisar antara 90% sampai 100%. Tingginya daya serap ini disebabkan oleh terbatasnya dana yang tersedia, sedangkan UT sebagai sebuah universitas yang relatif baru, kegiatan pembangunan sarana fisik dan non fisik (a.l pengembangan program, kebutuhan bahan dan alat praktikum, praktek lapangan) membutuhkan banyak dana.

Daya serap terhadap dana yang tersedia tergantung pada karakteristik jenis dananya. Dana Rutin umumnya selalu terserap karena aspek

pembelanjannya sudah jelas yaitu \pm 85% - 90% dari anggaran digunakan untuk pembayaran gaji.

Kesulitan menyerap dana umumnya terjadi pada dana Pembangunan (P2T). Karena sebagian besar dana P2T diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana fisik kampus, maka banyaknya unsur yang terkait, antara lain yaitu pelaksanaan bangunan (perencana, kontraktor, dan pengawas), Depdikbud, Bappenas, dan negara pemberi pinjaman menimbulkan beberapa pengaruh, ditambah masalah waktu pelaksanaan kurang sesuai dengan proses birokrasi tersebut. Keempat unsur yang disebut belakangan ini berkepentingan dalam pemberian persetujuan pelaksanaan proyek.

Melibatkan penulis modul dan penulis soal yang berasal dari luar UT juga mempengaruhi kemampuan daya serap alokasi dana. Keberadaan penulis tersebut tidak mudah dikontrol oleh dekan karena mereka berasal dari universitas tatap muka di luar UT. Hal ini menyebabkan penundaan dalam penyelesaian bahan belajar tersebut.

Kegiatan penelitian juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan rendahnya penyerapan dana. Jumlah mahasiswa UT relatif besar dan meningkat secara cepat, serta tersebar di seluruh Indonesia. Hampir seluruh waktu dan tenaga akademik UT dihabiskan untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pelayanan mahasiswa. Hal ini menyebabkan sulitnya para tenaga akademik tersebut untuk memusatkan perhatiannya kepada pelaksanaan kegiatan penelitian. Banyak proyek penelitian yang mereka kerjakan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Hasil yang Dicapai UT.

Keberhasilan pengelolaan dana yang diterima UT untuk kegiatan program pendidikannya dapat dilihat dari beberapa indikator yang antara lain meliputi: jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan tenaga administrasi, jumlah lulusan, ratio antara mahasiswa dengan dosen, jumlah penelitian yang dilaksanakan, dan jumlah buku yang dimiliki UT untuk setiap tahunnya. Lihat Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Statistik UT

J u m l a h	1990/1991	Tahun Anggaran		1993/1994
		1991/1992	1992/1993	
Mahasiswa	106,106	177,002	165,204	185,700
Lulusan	3,907	3,346	2,743	1,220*
Tenaga Dosen	336	333	788	791
Tenaga administrasi	618	651	680	681
Penelitian	9	89	69	66
Buku	7,237	8,407	8,799	9,660

Catatan: * = Jumlah lulusan sampai bulan Mei 1993.

Jumlah mahasiswa UT yang teregistrasi setiap tahunnya relatif besar. Sesuai dengan standar yang tercantum dalam SP4, besarnya jumlah mahasiswa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan anggaran ke Dikti. UT tidak mudah untuk memprediksi jumlah mahasiswa yang meregistrasi pada setiap semester. UT memberikan kelonggaran kepada mahasiswanya untuk tidak meregistrasi maksimum selama 4 semester berturut-turut. Konsekuensinya bagi UT adalah, besarnya dana yang diterima dari pemerintah bukan merupakan fungsi dari jumlah mahasiswa.

Sistem BJJ juga menimbulkan berkurangnya perolehan dana dari Pemerintah jika dibandingkan dengan perolehan yang didapatkan PTN konvensional. Karena proses belajarnya melalui jarak jauh, maka mahasiswa UT tidak membutuhkan sarana fisik yang memadai kegiatan pendidikan (gedung-gedung kuliah dan laboratorium), sehingga anggaran sarana fisik yang diajukan hanyalah untuk keperluan sarana fisik perkantoran. Hal ini terutama sekali dialami oleh UPBJJ, padahal UPBJJ juga menyelenggarakan tutorial, sosialisasi, perpustakaan, dan bimbingan akademis, dll. Di kantor UT Pusat, sebagian besar fasilitas juga diperuntukkan bagi perkantoran yang dilengkapi dengan gedung produksi multi media dan penyimpanan bahan belajar.

Sistem BJJ membawa dampak pula pada besarnya ratio antara mahasiswa dengan dosen. Kemandirian belajar yang dituntut bagi mahasiswa UT mengakibatkan tidak terjadinya hubungan langsung antara mahasiswa dengan dosen. Di UT, rasio antara jumlah mahasiswa dengan dosen tidak dapat dijadikan sebagai patokan yang menunjukkan keefektifan proses belajar di UT, karena tugas tutorial di daerah dilaksanakan dari dosen PTN/PTS yang ada di daerah tersebut, sedang tugas dosen UT adalah dalam bidang

pengembangan program, bahan belajar dan bahan ujian serta melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Sampai saat ini UT belum memiliki perpustakaan untuk perguruan tinggi yang dapat melayani peminjaman buku dan koleksi lainnya kepada mahasiswanya. Perpustakaan yang ada di UT pusat sekarang ini merupakan perpustakaan kantor saja yang diperuntukkan bagi pegawai UT, khususnya dan pengembangan bahan belajar UT lainnya. Sedangkan bagi mahasiswa UT, bisa menggunakan perpustakaan daerah milik Depdikbud/Sekneg atau perpustakaan PTN setempat.

Masalah, hambatan, dan Saran tentang Sistem Pembiayaan di UT

Cara pengajuan dana, seperti yang diatur oleh Dikti, sudah relatif baik karena sistem yang diterapkan dapat membantu UT dan Dikti dalam menghimpun data alokasi dana dan realisasinya secara seragam. Otonomi pengelolaan dana cukup baik karena memberi peluang bagi UT untuk mengelolanya secara fleksibel. Hanya saja bagi dana tertentu, seperti dana Pembangunan, fleksibilitas agak kurang karena banyaknya pihak yang terlibat. Masalah yang terjadi yang berkaitan dengan sumber dana adalah:

1. Bagi dana APBN, sebenarnya UT masih memerlukan dana investasi yang cukup besar, untuk sarana dan prasarana kantor pusat dan 32 UPBJJ, mengingat UT adalah PTN baru. Namun usulan anggaran selalu dipotong atau lebih rendah bila dibandingkan dengan PTN lainnya.
2. Penerimaan dana masyarakat dilaksanakan setiap hari sepanjang tahun (SPP dan bahan belajar), yang sulit diprediksi secara baik.

Cara pengalokasian dana dan pertanggungjawaban juga relatif baik, secara teknis tidak ada permasalahan yang ditemukan, namun secara sistem masih ada permasalahan. UT memang bertujuan untuk menyerap dana semaksimal mungkin, sehingga ada dana yang sebenarnya digunakan untuk pos-pos pembiayaan tertentu terpaksa dialihkan untuk kegiatan lain, guna mendukung kelancaran kegiatan di sektor lain.

Masalah yang masih ada sampai saat ini, meskipun secara teknis bisa diselesaikan dengan cara pengelolaan, adalah:

1. Pengetahuan cashflow, akibat dari pemasukan dana masyarakat yang berlaku sepanjang tahun dengan kebutuhan kegiatan yang keperluan biayanya juga belum bisa dipastikan, karena perubahan jumlah mahasiswa bisa terjadi setiap hari.
2. Pengalokasian dana ke daerah 32 UPBJJ setiap bulan dengan sistem droping dana cash, sedangkan SPJ-nya melalui pusat.

Sistem monitoring penggunaan dana agak sulit karena untuk ketiga jenis anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah (Rutin, Pembangunan, dan OPF) memakai istilah yang berbeda-beda, sehingga sinkronisasi keuangan menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini UT dalam pengajuan usulan anggarannya dimodifikasi (sesuai dengan Pedoman Unit Swadana) sehingga indikatornya hanya aspek yang dibiayai dan jenis pengeluarannya saja.

Melihat hambatan-hambatan geografis, komunikasi dan transportasi yang dihadapi UT dalam melayani mahasiswanya dan misi sosial yang diemban dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sedangkan mahasiswa UT pada umumnya adalah masyarakat bawah (ekonomi lemah), yang tidak bisa dibebani SPP lebih tinggi lagi, maka kecil sekali kemungkinan UT untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pendidikannya tanpa subsidi dari pemerintah. Otonomi akan dapat terlaksana jika biaya investasi (seperti pembangunan sarana/prasana fisik, penyediaan bahan dan alat) disubsidi oleh Pemerintah, sedangkan biaya operasionalnya (gaji pegawai, pemeliharaan, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dibiayai oleh Dana Masyarakat.

BAGIAN III. SISTEM PEMBIAYAAN DI PERGURUAN TINGGI LAIN

Untuk melihat keunikan sistem pembiayaan di UT, maka perbandingan dengan sistem pembiayaan di universitas lainnya perlu dilakukan. Dengan demikian akan terlihat dimana letak perbedaan antara sistem pengelolaan biaya di perguruan tinggi yang memakai sistem BJJ dengan perguruan tinggi tatap muka.

Perguruan Tinggi Pembanding.

Karena UT adalah sebuah perguruan tinggi milik Pemerintah, maka pembandingnya dipilih 3 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain yang sama-sama berlokasi di pulau Jawa, pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Dasar pertimbangan pemilihan ketiga PTN tersebut adalah adanya kekhususan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang dikembangkan oleh masing-masing PTN. Dalam studi ini, PIP diduga berpengaruh pada kurikulum yang dikembangkan, sehingga berdampak pada jenis kegiatan pendidikan yang dilaksanakan, alat dan bahan penunjang, serta fasilitas fisik pendukungnya.

Ketiga PTN tersebut adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung di Bandung; Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor; dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

IKIP Bandung adalah sebuah institut keguruan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli setara diploma, sarjana S1, S2, S3 kependidikan yang nantinya akan bertugas sebagai tenaga pengajar, baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Setelah 39 tahun berdiri, IKIP memiliki 6 fakultas dengan 38 jurusan dan 82 program studi.

IPB merupakan sebuah institut pertanian yang bertugas mencetak tenaga ahli setingkat S1, S2, dan S3 dalam bidang pertanian. IPB mempunyai 9 fakultas dengan 16 program studi.

Sedangkan UGM, merupakan universitas tertua di Indonesia, bertujuan untuk menghasilkan tenaga setingkat diploma, sarjana S1, S2, dan S3 dari berbagai disiplin ilmu. Setelah berusia hampir 44 tahun, UGM memiliki 18 fakultas dengan 45 jurusan.

Sumber Dana

Jenis sumber dana yang diperoleh ketiga perguruan tinggi ini sama dengan sumber dana yang diperoleh di UT. Dana yang berasal dari pemerintah terdiri dari dana Rutin, Pembangunan, dan OPF. Dana yang berasal dari usaha PTN sendiri yang disenut juga sebagai Dana Perolehan dari Masyarakat atau Dana Masyarakat, antara lain adalah hasil UMPTN, SPP, dan penjualan produk serta jasa. Dana lainnya adalah dana bantuan langsung dari dalam/luar negeri yang berupa kerjasama. Besarnya sumber dana yang diperoleh masing-masing PTN dapat dilihat pada lampiran B.

Cara Perolehan dan Penganggaran Dana

Sebagaimana halnya dengan UT, ketiga PTN ini juga melakukan prosedur yang sama dalam memperoleh dan membuat anggaran bagi dana baik yang berasal dari pemerintah, dari usaha PTN sendiri, atau bantuan langsung dari dalam/luar negeri.

Tidak seperti UT yang menentukan besarnya anggaran hanya berdasarkan jumlah mahasiswa dan program pendidikannya; ketiga PTN ini, selain mengajukan anggaran operasional pendidikan, juga mengajukan anggaran untuk pembangunan sarana fisik yang dapat mewadahi kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswanya. Besarnya anggaran sarana fisik ditentukan oleh jumlah mahasiswa dikalikan dengan satuan luas yang dibutuhkan (1 orang mahasiswa mendapat 1 M² luas bangunan), dikalikan dengan biaya per unit bangunan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang direalisasikan Dikti untuk ketiga PTN ini rata-rata berkisar antara 60% - 100% dari anggaran yang diusulkan. Secara lebih terinci persentase realisasi anggaran untuk masing-masing perguruan tinggi dapat dilihat dari Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran untuk PTN Pembanding

No.	PTN	Rata-rata persentase realisasi anggaran
1.	IKIP Bandung	60% - 75%
2.	IPB	60% - 75%
3.	UGM	75% - 100%

Dana Tambahan.

Ketiga PTN selalu mendapatkan dana tambahan pada setiap tahun anggaran. Dana tambahan pada anggaran Rutin biasanya diberikan oleh Dikti melalui pembayaran tunggakan rekening listrik dan telepon, ini dialami oleh UGM dan IKIP Bandung. Dana tambahan lainnya yang diperoleh oleh ketiga PTN tersebut adalah dana 'supplement' yang merupakan dana tambahan bagi anggaran OPF.

Alokasi dana

Besarnya alokasi dana untuk setiap unit kerja sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan oleh Mendikbud.

Kebijakan pengalokasian dana ke unit-unit kerja di masing-masing PTN dibuat berdasarkan jumlah mahasiswa, jumlah tenaga akademik, tenaga administrasi, dan kelancaran program pendidikan yang dilaksanakan. Alokasi dana ke unit kerja di masing-masing PTN secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran E.

Pengelolaan dana yang telah dialokasikan didasarkan pada pola gabungan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Untuk IKIP Bandung, dana Rutin dan dana P2T dikelola sepenuhnya oleh institut, sedangkan untuk dana OPF, Dana Masyarakat, dan bantuan langsung, sebagian dikelola oleh fakultas/unit kerja, sebagian lainnya dikelola oleh institut.

Di IPB, dana Rutin, P2T, OPF, dan Dana Masyarakat dikelola sepenuhnya institut, sedangkan dana bantuan langsung dikelola sepenuhnya oleh fakultas/unit kerja.

Di UGM, sebagian dana Rutin, P2T, OPF, dan Dana Masyarakat dikelola oleh universitas, sebagian lainnya dikelola oleh fakultas/unit kerja. Sedangkan dana bantuan langsung dikelola sepenuhnya oleh fakultas.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh digunakan melalui cara yang sama dengan cara yang dilakukan UT yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Dana dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan memperbaiki, membina, dan mengembangkan kegiatan operasional pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan kerumahtanggaan. Penggunaan dana secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran D.

Daya Serap

Daya serap terhadap dana Rutin umumnya cukup tinggi, mencapai $\pm 100\%$, baik untuk IKIP Bandung, IPB, maupun UGM. UGM justru selalu mengalami defisit untuk dana Rutin ini. Kekurangannya biasanya ditutupi dari Dana Masyarakat.

Untuk dana Pembangunan (P2T), daya serap yang terjadi di ketiga PTN agak bervariasi. Di IKIP Bandung dan IPB daya serap terhadap dana ini mencapai 100%. Menurut keterangan, hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan program pendidikan yang harus dilaksanakan sedangkan dana yang tersedia terbatas.

Sedangkan di UGM, daya serap dana Pembangunan (P2T) dan OPF pada tahun 1991/1992 dan 1992/1993 relatif kecil (10%). Hal ini disebabkan oleh tertundanya pelaksanaan proyek pembangunan fisik karena prosedur persetujuan dari Dikti, Bappenas, atau Bank Dunia terlalu panjang sehingga prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga terlambat untuk dipertanggungjawabkan. Disamping itu dikemukakan pula alasan teknis pelaksanaan lainnya, antara lain seringnya terjadi tender ulang dan kontraktor yang tidak profesional.

Daya serap untuk dana OPF dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain misalnya, anggaran untuk KKN 1991/1992 di UGM, yang seharusnya bisa digunakan untuk 2 kali dalam setahun, hanya bisa diserap untuk 1 kali pelaksanaan, karena adanya Pemilu. Aspek lain adalah jumlah karyawan administrasi keuangan yang terbatas.

Kurang terserapnya dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan P3M (dari dana Rutin dan OPF) disebabkan oleh kurang aktifnya pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut. Adapun penyebabnya adalah:

- kegiatan pendidikan:
 - . jumlah dosen, ruang kuliah, ruang laboratorium, alat praktikum, dan buku teks belum memadai
- kegiatan penelitian:
 - . terbatasnya kesempatan meneliti karena mengajar
 - . unit cost dari anggaran penelitian, kecil dan prosedur sulit

- kegiatan pengabdian pada masyarakat:

. jumlah dana kecil

Dana Masyarakat biasanya dapat terserap dengan baik untuk setiap tahun anggaran. Peraturan penggunaan dana yang dibuat oleh Pemerintah kadang-kadang membuat pengelolaan menjadi sulit. Misalnya UGM memperoleh Dana Masyarakat sebesar Rp 4 milyar, pengeluaran sementara hanya Rp 1 milyar, sisanya sebesar Rp 3 milyar tidak bisa didepositokan karena tidak sesuai dengan peraturan, padahal bunga yang diperoleh cukup menguntungkan.

Hasil yang Dicapai

Dengan komposisi dana yang diperoleh masing-masing perguruan tinggi pembeding, maka hasil program pendidikan yang dicapai setiap PTN dapat digambarkan pada Tabel Statistik berikut ini.

Tabel 3.4 Statistik Keempat Perguruan Tinggi

#.	Item Statistik	UT			IKIP Bandung		
		91/92	92/93	93/94	91/92	92/93	93/94
1.	Mahasiswa	177 002	165 204	170 952	11 435	12 294	13 6242
2.	Lulusan	3 346	2 743	1 220*	3 144	3 176	2 9940*
3.	Staf Akademik	333	788	791	1 108	1 234	1 2951
4.	Staf Administrasi	651	680	681	1 191	1 263	1 0731
5.	Proyek Penelitian	89	69	66	219	203	2566
6.	Buku	8 407	8 799	9 660	40 972	41 187	41 1870
7.	Fakultas	4	4	4	6	6	64
8.	Program Studi	34	34	34	38	38	384

#.	Item Statistik	IPB			UGM		
		91/92	92/93	93/94	91/92	92/93	93/94
1.	Mahasiswa	11 487	11 869	12 263	31 259	30 952	26 9633
2.	Lulusan	2 721	1 750	NA	4 416	4 550	328*
3.	Staf Akademik	1 230	1 269	NA	2 072	2 074	2 057
4.	Staf Administrasi	1 885	1 911	NA	2 619	2 632	2 575
5.	Proyek Penelitian	313	677	402	1 107	1 014	1 1592
6.	Buku	84 562	88 973	NA	307 241	324 211	340 422
7.	Fakultas	9	9	NA	18	18	18
8.	Program Studi	16	16	NA	45	45	45

Note: * = Lulus pada semester I tahun 1993;
 Proyek penelitian: dalam judul
 B u k u : dalam judul

Karena mahasiswa UT tersebar di seluruh pelosok Indonesia maka penyediaan buku acuan bukan merupakan prioritas utama. Disamping itu modul-modul UT didesain agar menjadi bahan belajar yang self-content dimana mahasiswa tidak tergantung pada sumber dari bahan belajar tersebut. Melalui tabel juga dapat dilihat bahwa UT dapat meningkatkan jumlah mahsiswanya setiap tahun, tapi staf akademiknya sangat sulit untuk melakukan penelitian karena banyaknya tugas yang berhubungan dengan masalah administrasi. Sistem belajar UT juga nampaknya berkaitan dengan jumlah program studi yang ditawarkan.

Masalah, Hambatan, dan Saran tentang Sistem Pembiayaan

Secara umum ketiga PTN setuju dengan sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (SP4) yang telah ditetapkan oleh Dikti, karena dasar pertimbangan pembuatan anggaran jelas, sasaran yang ingin dicapai jelas, cukup sistematis, dan sinkron antara perencanaan dan penggunaan dananya.

Cara ini juga menjamin adanya sistem pertanggungjawaban yang lebih mudah dan cepat, karena sudah jelas penganggaran dan biayanya. Dilain pihak UGM berkomentar bahwa untuk beberapa hal, prosedur pertanggungjawaban yang diminta terlalu panjang, misalnya untuk dana sebesar Rp 1 juta disyaratkan membuat Surat Perintah Kerja. Prosedur ini dirasa terlalu berbelit-belit, mengingat nilai uang Rp 1 juta untuk saat ini tidak terlalu besar. Karena itu perlu peninjauan kembali dalam sistem pertanggungjawabannya.

Petunjuk Operasional yang diterbitkan Dikti kadang-kadang kurang fleksibel, karena apa yang dianggarkan berbeda dengan apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya dari PTN tapi tidak ditolerir (misal penyediaan AC untuk kantor pimpinan universitas). Seharusnya sistem penganggaran disesuaikan dengan sasaran. Jika diadakan revisi, sering membutuhkan waktu yang lama, sehingga sering terlambat. Jarak antara daerah lokasi PTN dengan Dikti dalam hal ini cukup menjadi penghambat intensitas komunikasi. Keluhan ini disampaikan dari UGM.

Baik UT, IKIP Bandung, IPB, maupun UGM menyatakan bahwa perguruan tinggi mereka dapat berdiri sendiri dalam hal pembiayaan, asal misi sosial tidak lagi perlu diemban, sehingga dengan demikian keempat perguruan tinggi tersebut dapat menaikkan tarif SPP yang harus dibayar mahasiswa, yang besarnya mungkin akan menyamai SPP di Perguruan Tinggi Swasta. Selain itu dibutuhkan pula peningkatan peran serta masyarakat, sehingga kerjasama dengan lembaga/perguruan tinggi di dalam/luar negeri akan lebih banyak terjalin.

Universitas Terbuka

BAGIAN IV. PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UT DENGAN PTN LAINNYA

Baik UT maupun ketiga PTN lainnya mempunyai jenis sumber dana yang sama dan prosedur perolehan dan penganggaran yang tidak berbeda jauh. UT memang tidak dapat mengajukan anggaran untuk pembangunan sarana fisik untuk kegiatan perkuliahan, tapi besarnya anggaran dapat dikompensasikan dengan faktor jumlah mahasiswa yang relatif besar (± 4 kali jumlah mahasiswa UGM).

Terlihat bahwa IPB mendapat dana tahunan yang paling tinggi diantara tiga PTN lainnya. Banyaknya kegiatan praktikum, kegiatan ke lapangan, dan cukup besarnya jumlah mahasiswa (rata-rata = 20.000 orang) nampaknya berkontribusi terhadap besarnya dana ini.

Besarnya dana yang diperoleh dari pemerintah di setiap PTN menunjukkan adanya perbedaan. Jika jumlah fakultas dipakai sebagai tolok ukur besarnya perolehan dana, maka setiap fakultas untuk masing-masing PTN pada tahun 1992/1993 akan memperoleh dana sebesar:

UT = Rp 1,8 milyar; IKIP Bandung = Rp 2,9 milyar; IPB = Rp 6,4 milyar; dan UGM = Rp 2,6 milyar. Jadi UT merupakan institusi yang menerima dana pemerintah paling sedikit dibandingkan ketiga institusi lainnya.

Jika tolok ukur yang digunakan adalah besarnya dana yang diterima oleh setiap mahasiswa, maka mahasiswa UT merupakan penerima dana yang terendah dibandingkan dengan mahasiswa dari ketiga PTN lainnya. Jumlah dana yang diterima oleh setiap mahasiswa di setiap perguruan tinggi diperlihatkan dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Dana Pemerintah yang Diterima oleh Setiap Mahasiswa di Keempat Perguruan Tinggi (pada tahun 1992/1993)

#.	Institusi	Jumlah Dana yang Diterima (dalam Rp 000)	Jumlah Mahasiswa	Dana yang Diterima oleh Setiap Mahasiswa (Rp)
1.	UT	6 919 479	165 204	41 880
2.	IKIP Bandung	17 691 790	12 294	1 440 000
3.	IPB	57 716 330	11 869	4 862 780
4.	UGM	47 526 314	30 952	1 535 480

Sumber utama dana UT telah bergeser dengan sangat cepat dari dana yang berasal dari pemerintah ke dana yang berasal dari masyarakat dibandingkan dengan universitas lainnya di Indonesia.

Alokasi dana yang terjadi disetiap PTN mempunyai kecenderungan yang sama, dimana dana paling besar teralokasi di BAU dan fakultas (lihat lampiran C).

Cara penggunaan dana juga mempunyai kecenderungan yang sama antara UT, IKIP, dan IPB dimana yang paling banyak menggunakan dana adalah kegiatan pendidikan dan kerumahtanggaan. Khusus untuk UGM kegiatan lain yang menggunakan banyak dana adalah kesejahteraan pegawai (lihat lampiran D).

Nampaknya ada hubungan antara jumlah tenaga akademis dengan jumlah penelitian yang dihasilkan. UGM terlihat sangat produktif menghasilkan penelitian, sebaliknya UT paling sedikit menghasilkan. Jadi, selain pengaruh besarnya dana dan karakteristik tugas staf akademik UT yang berbeda dengan mereka yang ada di PTN, kemampuan, yang berarti juga banyaknya jumlah tenaga akademik dan kualifikasinya, berpengaruh pula pada output universitas dalam hal penelitian.

BAGIAN V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. a. Tidak ada perbedaan dalam proses perolehan dana di UT maupun IKIP Bandung, IPB dan UGM. Dana yang diperoleh bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberi subsidi dalam bentuk anggaran rutin pembangunan dan OPF, sedangkan dana masyarakat berasal dari SPP dan penjualan barang/jasa.
b. Perbedaan yang terlihat adalah UT sebagai perguruan tinggi massal memperoleh dukungan dana masyarakat yang lebih besar dibandingkan IKIP Bandung, IPB dan UGM. Perolehan dana UT dari pemerintah bukan merupakan fungsi dan jumlah mahasiswa, sebab walaupun jumlah mahasiswa UT relatif banyak, UT menerima subsidi pemerintah yang relatif sedikit IKIP Bandung, IPB, dan UGM.
2. a. Secara umum pengalokasian dana di UT, IKIP Bandung, IPB, dan UGM tidak berbeda. Alokasi dana yang terbesar adalah untuk kegiatan kerumahtanggaan, sedangkan untuk pengeluaran operasional yang terbesar adalah untuk pembayaran gaji pegawai. Demikian pula halnya dengan dana untuk tiap unit kerja, alokasi yang terbesar adalah untuk Kantor Pusat.
b. Dengan formula alokasi dana khusus dan berbeda dengan perguruan tinggi negeri lainnya sebenarnya UT bisa memperoleh manfaat yang lebih besar dalam menerapkan prinsip-prinsip skala ekonomi dalam menjalankan kegiatannya. Mahasiswa UT jumlahnya relatif besar dan berhadapan dengan kendala geografis, komunikasi dan transportasi sehingga berbeda dengan mahasiswa di perguruan tinggi tatap muka.
c. Daya serap dana di UT dan IKIP Bandung, IPB serta UGM cukup tinggi.

- d. Hasil yang dicapai oleh UT seperti jumlah mahasiswa, lulusan, staf akademik, matakuliah yang ditawarkan dan karya penelitian masih agak kabur jika dilihat relevansinya dengan dana yang diperoleh.

Implikasi

Prinsip dari pendidikan jarak jauh terletak pada penerapan skala ekonomi dalam pengoperasiannya, semakin besar jumlah mahasiswanya maka biaya rata-ratanya akan mendekati biaya marginal per mahasiswa (Rumbel, 1981). Jika dikaitkan dengan UT sebagai suatu "industri", di satu pihak akan semakin menguntungkan jika jumlah mahasiswa UT terus meningkat, tetapi di lain pihak masih ada kendala yang cukup serius seperti faktor-faktor geografis, komunikasi dan transportasi yang menyebabkan mahasiswa UT t "terisolasi".

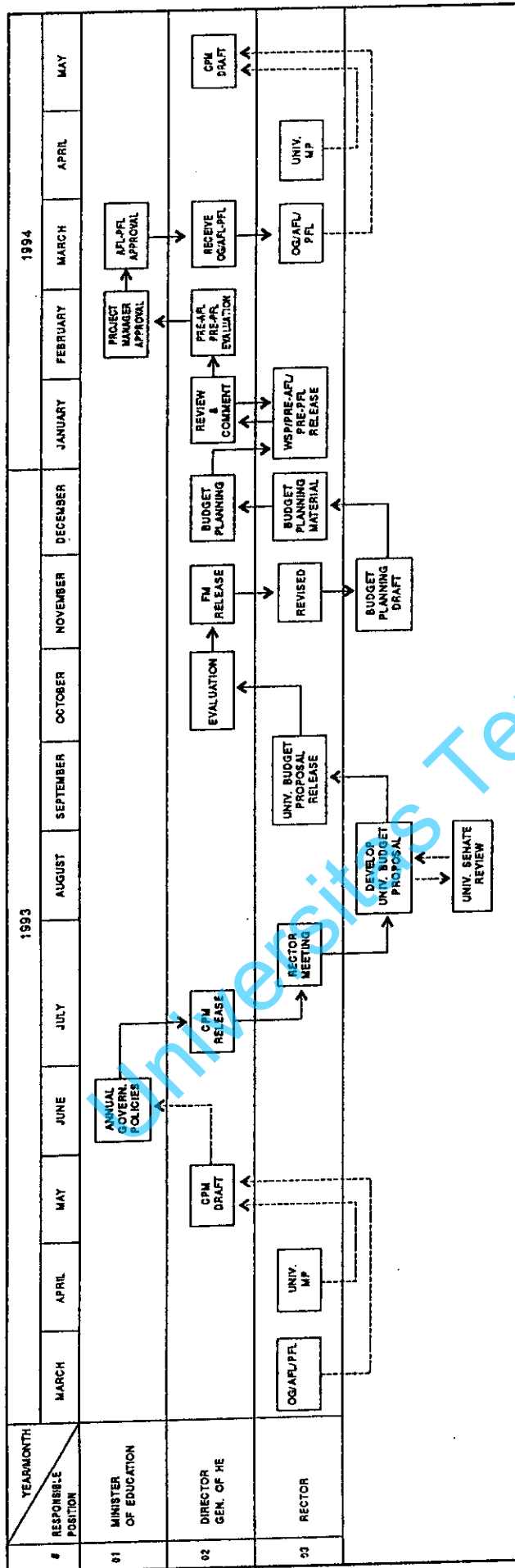
Dari penelitian ini tersirat bahwa perlu suatu gagasan untuk membedakan cara dan prosedur pembiayaan antara UT dengan perguruan tinggi negeri tatap muka.

KEPUSTAKAAN

- Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4). (1984). Jakarta: Ministry of Education.
- Boediono, McMahon, W. W. & Adams, D., eds. (1992). Education, Economic and Social Development: the Second 25 year Development Plan and the Sixth 5 Year Development Plan Background Papers and Goals. Jakarta: the Ministry of Education, Center for Informatics.
- Hardy, N. E. (1988). Faculty Adjustment to Changing Funding Patterns within the University System of British Columbia: The University of Victoria Case. A Preliminary Research Enquiry, University of Victoria, Canada.
- Katalog Universitas Terbuka. (1993). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Laporan Rektor Universitas Gadjah Mada. (1992, Desember). Laporan dipresentasikan pada rapat senat UGM, Yogyakarta, Indonesia.
- Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada. (1992). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada. (1993). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Laporan Tahunan Universitas Terbuka. (1992). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Laporan Tahunan Universitas Terbuka. (1993). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mahdiarti, E., Mikdar, S., & Isfarudi (1990). Studi Pembiayaan, Manfaat dan Keputusan Enrolmen Mahasiswa Program S1 UT dan Universitas Biasa: Tinjauan Pembiayaan. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, PAU/IUC (Bank Dunia XVII).
- McMahon, W.W. & Boediono, eds. (1992). Education and the Economy: The External Efficiency of Education. Jakarta: Ministry of Education, Center for Informatics.
- Nielsen, D. & Djalil, A. (1989). Teacher Training by the Indonesian Open Learning University: The Relationship of Private Costs and Expected Benefits to Enrollment Decisions. Laporan dipresentasikan pada the 2nd Bridges Annual Meeting in Bangkok, Thailand.

- Nielsen, D.H., Tatto, M.T., Djalil, A. & Kularatne, K. (1991). The Cost Effectiveness of Distance Education for Teacher Training. Bridges Research Report Series, (9).
- Peters, O. (1981). Distance Teaching and Industrial Production: A Comparative Interpretation in Outline. Dicitak ulang dalam Sewart, D., Keegan, D., and Holmberg, B., eds. Distance Education: International Perspectives. London: Routledge.
- Rumble, G. (1981). Economics and Cost Structures. Dalam Keye, A. and Rumble, B. eds. Distance Teaching for Higher and Adult Education. London: Croom Helm.
- Srisa-an, W. (1986). Financing and Cost-Effectiveness of Distance Education. Dalam Van der Linder, G.H.P.B. (Chair), Distance Education Volume 1: Proceedings of the Regional Seminar on Distance Education in Bangkok, Thailand (pp. 498-532). Manila, Philippine: Asian Development Bank.
- Staff Appraisal Report. Indonesia Primary School Teacher Development Project . (Report No. 10399- IND). Unpublished report.
- Strudwick, J. (1991). The Transistion from Tertiary Education to Employment (USAID Report Jakarta, Indonesia Contract No. 497-0358-0-00-1059-00). Arlington, VA: Institute for International Research.
- Suparman, A. (1992). Pendidikan Jarak Jauh. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, PAU/IUC (Bank Dunia XVII).
- Swasono, Y. and Boediono. (1990). Prospek sumberdaya manusia pada pembangunan jangka panjang Indonesia. Indonesian Journal of Demography . (34) . 21-34.
- Tsang, M.C. (1987). Cost Analysis for Educational Policymaking: A Review of Cost Studies in Education in Developing Countries. Paper submitted to Harvard University fulfillment of literature review and synthesis requirements for Project BRIDGES. Michigan: Michigan State University, College of Education.
- UNESCO (1988). The Indonesian Open Learning University: A case study under the UNESCO project on the study of Asian Institutions making large-scale use of communications technologies for educational purposes. Jakarta: Universitas Terbuka, Research and Community Service Center.
- UNESCO .(1990). A Study of Five Asian Institutions Making Large Scale Use of Comtech for Educational Purpose. Paris: Unesco.

APPENDIX A PLANNING, PROGRAMMING AND BUDGETING SYSTEM CYCLE



NOTE

- OG = OPERATIONAL GUIDE
- AFL = ACTIVITIES FILLED-IN LIST
- PFL = PROJECT FILLED-IN LIST
- MP = MASTER PLAN
- CPM = COORDINATIVE PROGRAM MEMORANDUM
- GOVERN. = GOVERNMENT
- UNIV. = UNIVERSITY
- FM = FINANCIAL MEMORANDUM
- WSP = WORKSHEET PLAN

LAMPIRAN B

Tabel Sumber Dana UT

#.	Sumber Dana	1991/1992	%	Tahun Anggaran 1992/1993	%	1993/1994	%
1.	Rutin	2 400 498	26	2 789 301	17	3 010 588	17
2.	Pembangunan	2 400 801	25	2 928 869	17	1 900 000	10
3.	OPF	456 608	5	1 201 309	7	1 218 523	7
4.	Masyarakat						
	SPP	1 653 494	18	6 287 952	38	6 116 274	34
	Penjualan Jasa	2 395 453	26	3 419 290	21	5 750 000	32
T o t a l		9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Tabel Sumber Dana IKIP Bandung

#.	Sumber Dana	1991/1992	%	Tahun Anggaran 1992/1993	%	1993/1994	%
1.	Rutin	806 979	8,1	8 507 752	42,4	12 338 506	38,1
2.	Pembangunan	4 298 245	43,3	4 794 668	23,9	13 349 048	41,2
3.	OPF	2 829 669	28,6	4 389 370	21,9	3 963 518	12,2
4.	Masyarakat						
	SPP	1 988 710	20,0	2 371 625	11,8	2 750 010	8,5
	Non SPP	NA		NA		NA	
T o t a l		9 923 603	100	20 063 415	100	32 401 082	100

Tabel Sumber Dana IPB

#.	Sumber Dana	1991/1992	%	Tahun Anggaran 1992/1993	%	1993/1994	%
1.	Rutin	8 479 370	17,7	9 749 017	16,3	10 585 951	11,1
2.	Pembangunan	30 163 776	63,3	45 105 433	75,5	71 658 028	75,4
3.	OPF	1 919 067	4,0	2 861 880	4,8	2 971 907	3,1
4.	Masyarakat						
	SPP	3 482 263	7,3	959 752	1,6	3 576 933	3,8
	Non SPP	3 836 930	8,0	1 057 502	1,8	6 272 080	6,6
T o t a l		47 881 406	100	59 734 084	100	95 064 899	100

Tabel Sumber Dana UGM

#.	Sumber Dana	1991/1992	%	Tahun Anggaran 1992/1993	%	1993/1994	%
1.	Rutin	14 396 300	24	14 992 216	27	16 380 753	33
2.	Pembangunan	37 214 141	62	29 085 471	52	21 955 195	44
3.	OPF	2 840 769	5	3 448 627	6	3 613 594	7
4.	Masyarakat						
	SPP	2 804 850	5	2 228 308	4	3 468 870	6
	Non SPP	2 606 000	4	5 941 458	11	4 602 930	10
T o t a l		59 862 060	100	55 696 080	100	50 021 342	100

Catatan: dalam Rp 000.

LAMPIRAN C

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Kegiatan di UT

#.	Kegiatan	1991/1992	%	Tahun anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Pengajaran	2 091 644	22,5	4 498 454	27,1	3 777 273	21,00
2.	Penelitian	24 649	,3	63 481	,4	78 368	,43
3.	Pengabdian (P2M)	28 339	,3	172 820	1,0	3 600	,02
4.	Kemahasiswaan	19 498	,2	49 108	,3	182 037	1,01
5.	Operasional	7 142 724	76,6	11 842 858	71,2	13 954 107	77,54
T o t a l		9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Tabel Alokasian Dana Berdasarkan Kegiatan di IKIP Bandung

#.	Kegiatan	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Pengajaran	5 649 971	57	6 431 164	31	9 871 066	30
2.	Penelitian	325 770	3	327 070	2	482 063	2
3.	P2M	124 450	2	178 166	1	383 801	1
4.	Kemahasiswaan	101 444	1	148 887	1	248 564	1
5.	Operasional	3 721 968	37	12 978 126	65	21 415 587	66
T o t a l		9 923 603	100	20 063 415	100	32 401 082	100

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Kegiatan di IPB

#.	Kegiatan	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Pengajaran	15 085 319	31,5	14 848 655	24,8	17 542 869	18,5
2.	Penelitian	2 907 988	6,1	930 541	1,6	4 390 706	4,6
3.	P2M	710 556	1,5	322 820	,5	1 577 321	1,6
4.	Kemahasiswaan	154 613	,3	71 579	,1	512 609	,5
5.	Operasional	29 022 990	60,6	43 560 489	73,0	71 041 394	74,8
T o t a l		47 881 406	100,0	59 734 084	100,0	95 064 899	100,0

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Kegiatan di UGM

#.	Kegiatan	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Pengajaran	6 237 316	11,0	10 665 445	19,0	12 642 335	25,3
2.	Penelitian	540 283	,9	685 413	1,3	828 467	1,6
3.	P2M	314 156	,5	430 794	,8	355 440	,7
4.	Kemahasiswaan	540 841	,9	382 776	,7	92 000	,2
5.	Operasional	38 562 099	64,0	43 531 652	78,2	36 103 100	72,2
T o t a l		59 862 060	100	55 696 080	100	50 021 342	100

Catatan: dalam Rp 000.

LAMPIRAN D

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pengeluaran Operasional di UT

#.	Pengeluaran	1991/1992		Tahun Anggaran 1992/1993		1993/1994	
			%		%		%
1.	Gaji	3 606 241	38,7	5 613 793	33,8	4 970 083	27,6
2.	Material	1 319 455	14,2	3 983 302	24,0	4 589 274	25,5
3.	Pemeliharaan	392 083	4,2	1 656 063	10,0	991 337	5,5
4.	Perjalanan	198 123	2,1	255 100	1,5	260 883	1,4
5.	Lain-lain	3 790 952	40,8	5 118 463	30,7	7 183 808	40,0
T o t a l		9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pengeluaran Operasional di IKIP Bandung

#.	Pengeluaran	1991/1992		Tahun Anggaran 1992/1993		1993/1994	
			%		%		%
1.	Gaji	2 752 031	27,20	10 877 257	54,23	11 828 902	36,50
2.	Material	731 295	7,40	609 200	3,03	734 066	2,30
3.	Pemeliharaan	1 157 335	11,70	845 892	4,21	591 781	1,80
4.	Perjalanan	-	-	10 500	0,05	12 500	0,03
5.	Lain-lain	5 282 943	53,20	7 720 566	38,48	19 234 083	59,37
T o t a l		9 923 604	100,00	20 063 415	100,00	32 401 082	100,00

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pengeluaran Operasional di IPB

#.	Pengeluaran	1991/1992		Tahun Anggaran 1992/1993		1993/1994	
			%		%		%
1.	Gaji	14 517 952	30,2	14 945 188	25,0	17 704 529	18,6
2.	Material	12 646 813	26,4	10 609 254	17,7	21 583 024	22,7
3.	Pemeliharaan	1 640 300	3,3	1 830 058	3,1	1 835 770	2,0
4.	Perjalanan	543 660	1,1	147 668	0,2	1 023 784	1,1
5.	Lain-lain	18 532 821	39,0	32 201 916	54,0	52 917 292	55,6
T o t a l		47 881 406	100	59 734 084	100	95 064 899	100

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pengeluaran Operasional di UGM

#.	Pengeluaran	1991/1992		Tahun Anggaran 1992/1993		1993/1994	
			%		%		%
1.	Gaji	21 098 959	35,2	23 189 524	41,6	23 894 858	47,8
2.	Material	20 467 770	34,2	22 411 751	40,2	5 181 785	10,4
3.	Pemeliharaan	1 806 105	3,0	1 132 270	2,1	1 512 604	3,0
4.	Perjalanan	219 481	0,4	286 430	0,5	142 633	0,3
5.	Lain-lain	16 269 745	27,2	8 676 105	15,6	19 289 462	38,5
T o t a l		59 862 060	100	55 696 080	100	50 021 342	100

Catatan: dalam Rp 000.

LAMPIRAN E

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pemakai di UT

#.	Pemakai	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Fakultas	-		961 167	5,8	1 831 894	10,2
2.	Pusat Penelitian	-		299 595	1,8	330 574	1,8
3.	P2M	-		127 500	,8	173 962	1,0
4.	Kantor Pusat	5 850 982	84,7	14 038 459	84,4	11 511 937	64,0
5.	UPBJJ	1 060 419	15,3	1 200 000	7,2	4 147 018	23,0
T o t a l		9 306 854	100	16 626 721	100	17 995 385	100

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pemakai di IKIP

#.	Pemakai	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Fakultas	3 231 027	32,5	7 484 763	37,3	11 828 947	36,5
2.	Pusat Penelitian	90 473	,9	64 830	,3	93 951	,3
3.	P2M	111 669	1,2	120 060	,6	185 716	,6
4.	Kantor Pusat	6 490 433	65,4	12 393 762	61,8	26 254 804	62,6
T o t a l		9 923 603	100	20 063 415	100	32 401 082	100

Tabel Alokasi Dana Berdasarkan Pemakai di UGM

#.	Pemakai	1991/1992	%	Tahun Anggaran		1993/1994	%
				1992/1993	%		
1.	Fakultas	16 992 606	28,4	18 007 511	32,3	19 408 996	38,8
2.	Pusat Penelitian	199 339	,3	207 878	,4	242 510	,5
3.	P2M	189 251	,3	269 499	,5	65 324	,1
4.	Perpustakaan	266 630	,4	313 989	,6	401 233	,8
5.	Pusat Komputer	70 000	,1	69 574	,1	45 000	,1
6.	Kantor Pusat	42 143 634	70,5	36 827 629	66,1	29 858 269	59,7
Total		59 862 060	100	55 696 080	100	50 021 342	100